

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN
MELALUI KLINIK IPTEK MINA BISNIS
(Studi di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan dan di Desa Weru
Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)**

Robert Durianto, Agus Suryono, Hermawan

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang
E-mail: robertdurianto@gmail.com

Abstract: *Fishermen Community Empowerment Through Klinik IPTEK Mina Bisnis (Study at Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan and Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan). Fishermen community group in Kabupaten Lamongan is not separated from technology and innovation aspect in conduct their business. To be accepted and able to be better utilized, most governmental programme should be followed with direct approach in the form of advocate activities toward business player in sites. Kabupaten Lamongan based on its Cooperative Agreement with Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Nomor 24.1/BBPSEKP/TU.330/2012 would held Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) as an attempt to empower fishermen community group. KIMBis would encourage productive entrepreneurship in fishermen community group through training and advocate activities by stakeholders. This study is a qualitative descriptive study, with the objectives to describe KIMBis institution, as the place for fishermen community empowerment through communication, advocate and consultation. Result of this study showed that KIMBis activities, in so far, is yet maximally operated and still dominated by training for community and stakeholder involvement was still suboptimal. Several achievement from this activity were (a) Increasing entrepreneurship orientation and (b) Better development of its human resources.*

Keywords: *fishermen, entrepreneurship, Klinik IPTEK Mina Bisnis*

Abstrak: *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Melalui Klinik IPTEK Mina Bisnis (Studi di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan dan di Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan). Kelompok masyarakat nelayan di Kabupaten Lamongan tidak lepas dari aspek teknologi dan inovasi untuk menjalankan usahanya. Agar dapat diterima dan mampu dimanfaatkan lebih baik semestinya berbagai program kegiatan dari pemerintah juga diikuti dengan pendekatan langsung berupa pendampingan kepada pelaku usaha di lokasi. Kabupaten Lamongan berdasarkan Perjanjian Kerjasama dengan Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Nomor 24.1/BBPSEKP/TU.330/2012 dilaksanakan kelembagaan Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) dalam rangka pemberdayaan masyarakat nelayan. KIMBis mendorong *entrepreneurship* yang produktif dalam kelompok masyarakat nelayan melalui pelatihan dan pendampingan oleh *stakeholders* terkait. Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan kelembagaan KIMBis sebagai wadah pemberdayaan masyarakat nelayan melalui komunikasi, advokasi/pendampingan, dan konsultasi. Hasil penelitian ini menunjukkan, kegiatan KIMBis sejauh ini belum maksimal masih terdominasi pelatihan untuk masyarakat dan keterlibatan *stakeholders* dipahami tidak terjadi secara optimal. Beberapa capaian dari kegiatan ini, yaitu (a) Meningkatnya orientasi kewirausahaan dan (b) Kualitas sumberdaya manusia berkembang cukup baik.*

Kata kunci: *nelayan, entrepreneurship, Klinik IPTEK Mina Bisnis*

Pendahuluan

Sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia, Indonesia dikaruniai sumber daya kelautan dan keanekaragaman hayati yang besar. Berdasarkan data Kelautan

Perikanan dalam angka (2013, h.76) Indonesia memiliki 17.499 buah pulau dengan panjang garis pantai membentang 80.791 km dan luas lautnya mencapai 3,25 juta km². Di samping itu, dikutip dari situs Kementerian Kelautan dan

Perikanan potensi tangkap perairan laut Indonesia diperkirakan 7,3 juta ton/tahun yang secara ekonomi ditaksir 1,2 triliun dolar AS, atau setara 10 kali lipat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tahun 2012. Karenanya, melalui pendapat Kusnadi (2003, h.102) mengarah bahwa keberadaan potensi kelautan yang besar itu semestinya dapat dijadikan alasan pertimbangan beralihnya paradigma pemba-ngunan nasional dari daratan (*land based orientation*) ke maritim (*ocean based orientation*).

Kendatipun, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mencapai peningkatan produksi, laju, dan nilai ekspor. Sebaliknya menurut Bengen (2010, h.2) pembangunan kelautan dan perikanan masih juga menyisakan permasalahan pokok, diantaranya *overfishing*, kerusakan lingkungan, pencemaran, dan kemiskinan di sebagian besar nelayan. Kemiskinan pada umumnya, dan khusus masyarakat nelayan dilatarbelakangi oleh persolan kompleks. Dalam hal ini dikemukakan dari pendapatnya Salim (1984, h.40) bahwa kemiskinan pada dasarnya dipicu karena tidak dimilikinya aset produksi dan lemahnya kemampuan produktivitas.

Uraian di atas, memberi arahan bahwanya perlu ada upaya lebih nyata dari pemerintah untuk mengoptimalkan potensi sumber daya kelautan dan fokus menyelesaikan masalah pokok dalam kemiskinan nelayan. Karena itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berdasarkan SK Kepala Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBPSEKP) Nomor 12.1/BALITBANGKP/RS.210/I/2012 melaksanakan program peningkatan kehidupan nelayan dengan membentuk Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) dalam rangka pemberdayaan masyarakat nelayan.

KIMBis, berdasarkan Petunjuk Teknis kegiatan (2011, h.1-2) dimengerti sebagai wadah komunikasi, advokasi/pendampingan, dan konsultasi di antara kelompok masyarakat nelayan yang beraktivitas di daerah pesisir dengan stakeholder terkait, melalui pendekatan *technopreneurship* untuk meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat nelayan. KIMBis dapat menjadi bagian atau cikal bakal pengembangan kegiatan dalam bentuk kerjasama melalui *Research Extension Fisheries Community Network* (REFINE). Pada kegiatan REFINE ini, peneliti – penyuluh – pelaku usaha (pengolah, pembudidaya ikan, nelayan, pedagang, dan investor) melakukan kegiatan bersama untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat terdukung intervensi paket teknologi dari Balitbang KP yang terpilih, renovasi paket

teknologi yang diintroduksi, dan membangun jaringan kerja.

Desa Weru di Kabupaten Lamongan, berdasarkan Perjanjian Kerjasama dengan BBPSEKP Nomor 24.1/BBPSEKP/TU.330/2012 ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan KIMBis. Tersedianya tempat pendaratan ikan dan produk pengolahan hasil tangkap secara turun temurun, tetapi masih bernilai ekonomis rendah dan ikan dominan terjual tanpa ada nilai tambah dan manfaat optimal terutama untuk nelayan miskin. Terbukti berdasarkan data Profil desa Weru tahun 2012, pendapatan rata-rata keluarga sebesar Rp. 700.000,- menandakan kesejahteraan penduduk cukup rendah. KIMBis mendorong tumbuhnya *entrepreneurship* yang produktif dalam kelompok masyarakat nelayan/pesisir dengan memanfaatkan ketersediaan IPTEK dan inovasi terdukung pendampingan pengurus di lokasi.

Keberadaan inisiasi kelembagaan masyarakat kelautan perikanan, komitmen kerjasama, dan harapan untuk meningkatkan kualitas kehidupan nelayan di desa Weru Kabupaten Lamongan, penulis tertarik mengadakan penelitian ini dan merumuskan masalah bagaimanakah kegiatan KIMBis sebagai wadah pemberdayaan masyarakat nelayan di desa Weru Kabupaten Lamongan melalui komunikasi, advokasi/pendampingan, dan konsultasi, serta apa sajakah faktor-faktor yang mendukung dan menghambatnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis kegiatan KIMBis sebagai wadah pemberdayaan masyarakat nelayan di desa Weru Kabupaten Lamongan melalui komunikasi, advokasi/ pendampingan, dan konsultasi, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambatnya.

Tinjauan Pustaka

1. Pemberdayaan Masyarakat

Manusia dalam fitrahnya merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup dengan sebaik-baiknya tanpa menjalin keserasian dan bergantung kepada Penciptanya, berdampingan bersama manusia lainnya, dan interaksi dengan ciptaan-Nya baik alam lingkungan hidup dan berbagai jenis hewan. Tanpa hal itu manusia belum dikatakan memiliki arti, nilai, dan makna dalam hidupnya di dunia ini. Berdampingan berarti saling mendukung dan melindungi. Melalui pendapat Gajanayake (1993, h.6) disampaikan bahwa pemberdayaan adalah konsep di atas partisipasi, yang terpenting darinya adalah upaya untuk membantu orang dalam membebaskan diri secara fisik maupun mental.

Menurut Friedman (1992, h.31) pemberdayaan dimengerti sebagai konsep alternatif pembangunan yang pada intinya mengarah pada otonomi pengambilan keputusan bersumber dari kelompok masyarakat, yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, demokratis, langsung melalui partisipasi, dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung. Sumodiningrat (1999, h.134) mengatakan pemberdayaan dilakukan pemerintah dikategorisasi ke dalam tiga kelompok, yaitu:

- 1) Kebijakan secara tidak langsung terarah pada sasaran tetapi memberikan dasar tercapainya suasana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi rakyat.
- 2) Kebijakan secara langsung terarah pada peningkatan kegiatan ekonomi kelompok sasaran.
- 3) Kebijakan khusus yang menjangkau lapisan masyarakat miskin melalui upaya tertentu secara khusus.

Pentingnya pemberdayaan sebagai usaha meningkatkan kemandirian, dalam hal ini Subejo dan Narimo dalam Mardikanto dan Soebianto (2012, h.31) mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah bentuk upaya disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal di dalam merencanakan, mengambil keputusan, dan mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki melalui *networking* dan *collective action* sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, sosial, dan ekologi.

2. Pemberdayaan Masyarakat Nelayan

Masyarakat nelayan sebagai kelompok yang secara langsung memanfaatkan dan mengusahakan sumberdaya perikanan melalui kegiatan tangkap dan budidaya juga tidak terlepas dari masalah kemiskinan. Menurut Nikijuluw (2001, h.15) kemiskinan atau ketertinggalan masyarakat nelayan disebabkan oleh tiga hal, yaitu:

- 1) Kemiskinan Struktural
Di sebabkan oleh pengaruh faktor atau variabel eksternal di luar individu. Variabel ini berupa struktur sosial ekonomi, ketersediaan fasilitas pembangunan, teknologi, dan sumberdaya khususnya alam.
- 2) Kemiskinan Super Struktural
Di sebabkan oleh variabel kebijakan makro yang tidak kuat berpihak pada pembangunan nelayan. Variabel ini meliputi kebijakan moneter dan fiskal, ketersediaan hukum dan perundang-undangan, dan bentuk proyek dan program pembangunan. Kategori kemiskinan ini sangat sulit diatasi bila tidak disertainya

keinginan dan kemauan tulus dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah pokok.

3) Kemiskinan Kultural

Di sebabkan oleh variabel yang melekat, *inheren*, dan telah menjadi gaya hidup. Karenanya sulit bagi individu keluar dari kemiskinan ini karena biasa tidak disadari oleh individu bersangkutan. Variabel ini berupa tingkat pendidikan, adat, pengetahuan, kepercayaan, budaya, dan kesetiaan pada pandangan-pandangan tertentu.

Panayotou dalam Nikijuluw (2001, h.16) juga menyampaikan nelayan tetap mau tinggal dalam kemiskinannya karena kehendaknya sendiri untuk menjalani kehidupan itu (*preference for a particular way of life*). Karena *way of life* ini maka apapun yang terjadi dengan keadaan dirinya, hal tersebut tidak dianggap sebagai masalah baginya. Karena itu, pada dasarnya kemiskinan masyarakat nelayan sangat sukar dirubah, bahwa perlu ada komitmen lebih nyata dari pemerintah dan daerah antar pelaku program untuk bersama-sama mengatasi akar kelemahan masyarakat nelayan.

Berdasarkan hal di atas, pendekatan pemberdayaan masyarakat nelayan yang dapat digunakan dalam penanggulangan kemiskinan masyarakat nelayan menurut Nikijuluw (2001, h.20), yaitu:

- 1) Penciptaan lapangan kerja alternatif sebagai sumber pendapatan lain bagi keluarga.
- 2) Mendekatkan masyarakat dengan sumber modal dengan penekanan pada penciptaan mekanisme mendanai diri sendiri (*self financing mechanism*).
- 3) Mendekatkan masyarakat dengan sumber teknologi baru yang lebih berhasil dan berdaya guna.
- 4) Mendekatkan masyarakat dengan pasar, dan
- 5) Membangun solidaritas serta aksi kolektif di tengah masyarakat.

Kelima pendekatan ini, dimengerti dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh tersandar aspirasi, kebutuhan, keinginan, pendapatan, dan potensi sumberdaya di masyarakat.

3. Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Melalui Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis)

Masyarakat kelautan perikanan di Kabupaten Lamongan tidak lepas dari kebutuhan teknologi dan inovasi untuk usahanya, yang juga perlu diiringi dengan pendekatan kepada pelaku (nelayan, pembudidaya, dan petambak garam) agar teknologi inovasi itu dapat diterima oleh masyarakat. Dibentuknya KIMBis di kawasan pesisir/nelayan diperlukan karena disamping kebutuhan masyarakat semakin berkembang

yang bersamaan dengan itu kapasitas untuk memanfaatkan potensi lingkungannya masih terbatas, juga kompleksitas masalah yang dihadapi masyarakat nelayan semakin rumit, padahal mereka belum mampu menyelesaikan masalah tersebut secara mandiri.

Klinik IPTEK Mina Bisnis dibentuk yang bertujuan untuk:

- 1) Mendorong tumbuhnya *entrepreneurship* di dalam masyarakat nelayan/pesisir sehingga mampu memperbaiki kehidupan ekonomi masyarakat.
- 2) Mempercepat proses diseminasi, difusi, dan adopsi teknologi kelautan dan perikanan dan umpan balik dari masyarakat untuk memperbaiki teknologi yang diintroduksi.

Oleh sebab itu, dalam fungsi ekonomi KIMBis dibangun sebagai wadah pembinaan dan pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat nelayan berbasis IPTEK melalui pendekatan *technopreneurship* bersandar pada potensi sumberdaya di lingkungannya, diharapkan mampu mendorong perkembangan ekonomi di wilayah pesisir. Secara tidak langsung juga dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi kepentingan atau kebutuhan antara sumber teknologi dengan pengguna untuk mendapatkan umpan balik.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Mcnabb (2002, h.267) bahwa penelitian kualitatif dipahami sebagai serangkaian teknik, dan proses penelitian non statistik yang digunakan untuk mengumpulkan data terhadap fenomena sosial. Kemudian, disampaikan Widodo dan Mukhtar dalam Harsono (2006, h.109) bahwa jenis penelitian deskriptif dimengerti sebagai suatu metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya kepada obyek penelitian suatu saat tertentu.

Fokus penelitian ini adalah: 1) Kegiatan KIMBis sebagai wadah pemberdayaan masyarakat nelayan meliputi komunikasi, advokasi/pendampingan, dan konsultasi, serta ketercapaian hasil pemberdayaan; dan 2) Faktor-faktor pendukung dan penghambat internal dan eksternal. Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Lamongan dan situs penelitian pada Dinas Kelautan dan Perikanan dan di desa Weru Paciran Kabupaten Lamongan sebagai lokasi kelembagaan KIMBis beroperasi. Sumber data diperoleh ke dalam dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri, pedoman wawancara (*interview guide*), dan perangkat penunjang. Sedangkan,

analisis data yang digunakan adalah analisis data Model Interaktif melalui tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Pembahasan

1. Kegiatan Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) Sebagai Wadah Pemberdayaan Masyarakat Nelayan

Kabupaten Lamongan terletak di pantai utara Jawa Timur dengan panjang garis pantai membentang sepanjang 47,162 Km, memiliki 5 tempat pendaratan ikan, yaitu Weru, Brondong, Kranji, Labuhan, dan Lohgung dengan pusat pendaratan ikan di Pelabuhan Perikanan Nasional Brondong. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang tercantum di dalam Lamongan dalam angka tahun 2013 menunjukkan, produksi perikanan tangkap laut pada 2012 mencapai 69.216,00 ton dengan nilai produksi Rp. 806,3 miliar. Hal ini diperkuat, bahwa produksi ikan laut yang dihasilkan dari tahun 2006 hingga 2012 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 12,58 %.

Sumberdaya kelautan yang memadai dan peluang ekonomi yang dapat dikembangkan, maka Kabupaten Lamongan ditetapkan sebagai lokasi KIMBis dan berpotensi dapat diarahkan untuk mendukung:

- 1) Pengembangan industrialisasi perikanan.
- 2) Akselerasi pencapaian target pembangunan kelautan dan perikanan khususnya mendorong percepatan peningkatan produksi.
- 3) Mengurangi jumlah penduduk miskin di pedesaan, sebagai *implementing agency* program peningkatan kehidupan nelayan.

Kendatipun, Kabupaten Lamongan berpotensi secara ekonomi dari sumberdaya lautnya. Perlu dipahami, dipilihnya lokasi KIMBis karena 2 hal, yaitu potensi ekonomi kelautan yang dapat dikembangkan dan hal pentingnya potensi itu belum mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat pesisir khususnya masyarakat miskin. Berdasarkan keterangan, desa Weru merupakan sentra pengolahan hasil laut turun temurun di Kabupaten Lamongan akan tetapi seluruh proses produksi masih menggunakan teknologi sederhana (peralatan tradisional) dan nilai tambahnya kurang, dari total 4.882 jiwa penduduk sejumlah 4.393 jiwa merupakan nelayan, dan armada penangkapan ikan berukuran <5GT maka sangat terbatas jelajahnya. Bahkan pendapatan rata-rata tiap kepala keluarga hanya sebesar Rp. 700.000,- perbulan. Karenanya, meskipun tingginya angka produksi sektor laut dan potensi perikanan yang tinggi, kenyataannya warga desa Weru sebagai masyarakat nelayan di pesisir Kabupaten

Lamongan belum bisa meningkatkan pendapatannya. Oleh karena itu, KIMBis beroperasi untuk mendorong *entrepreneurship* pada diri masyarakat nelayan/pesisir di desa Weru dan sekitarnya dan membantu masyarakat di dalam merencanakan, mengambil keputusan bersolusi pada masalah usaha, dan mengarahkan kemandirian dalam mengelola sumberdaya kelautan didukung teknologi dan inovasi di dalam kegiatan pemberdayaan melalui pendampingan pengurus di lokasi. Sehingga pada akhirnya mereka mampu mandiri dan percaya diri terhadap potensi kelautan yang ada di wilayahnya dan mampu meningkatkan ekonomi di kawasan pesisir. Berdasarkan keterangan, beberapa *stakeholders* pada kegiatan KIMBis ini, yaitu 1) Pemerintah Daerah: Kabupaten, Kecamatan, dan Desa dengan peran sebagai pendukung kegiatan; 2) Pemerintah Pusat adalah Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBPSEKP) selaku inisiator sekaligus penanggung jawab kegiatan; 3) Tokoh masyarakat; dan 4) Kelompok-kelompok masyarakat nelayan (pelaku usaha, pengolah, pedagang, pembudidaya, dan kelompok garam) sebagai subjek dan objek yang diberdayakan. Susunan *stakeholders* ini pada dasarnya mengacu pada arahan pusat meskipun juga telah ada pengembangan dari pihak pelaksana lokasi, kendatipun demikian susunan ini tidak dibentuk dan ditetapkan secara baku oleh pemerintah daerah Kabupaten Lamongan sehingga mengakibatkan proses pelaksanaan teknis kegiatan menjadi tidak optimal.

Proses komunikasi diantara kelompok masyarakat nelayan yang beraktivitas di daerah pesisir Kabupaten Lamongan dengan *stakeholders* terkait dilakukan dengan cara pelatihan. Kelompok masyarakat nelayan pada kegiatan KIMBis di desa Weru Kabupaten Lamongan ini, yaitu kelompok pengolah (pelaku usaha), kelompok budidaya, dan kelompok garam. Pihak inisiator ataupun sumber utama yang memiliki kepentingan dan kebutuhan untuk berkomunikasi adalah BBPSEKP didukung pendampingan pengurus di lokasi, dengan membawa nilai-nilai inovasi dan teknologi pada proses pemberdayaan ini, yang dimaksudkan agar masyarakat mau dan mampu memecahkan masalah (*problem solving*) dan agar masyarakat dapat berkelompok didukung pemberdayaan. Beberapa wujud inovasi dan teknologi yang telah diterapkan antara lain:

- a. Sertifikasi PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) untuk pelaku usaha, dikegiatanannya meliputi cara pengolahan yang baik, penerapan pengolahan mulai dari bahan baku hingga pemasaran, pemilahan bahan baku

olahan, dan upaya menerapkan prinsip *blue economy* berkonsep *zero waste* pada setiap proses produksi.

- b. Upaya peningkatan kualitas garam tradisional dan inovasi pakan alternatif untuk budidaya ikan lele.
- c. Gagasan modernisasi alat pengolahan dari tradisional ke arah modern.
- d. Teknik pemasaran melalui *website*.

Terdapat efek pada proses komunikasi ini, antara lain sertifikasi PIRT bagi 16 pelaku usaha, peningkatan pemahaman mengenai standarisasi (sterilisasi) pangan, dan meningkatnya kewirausahaan kelompok pengolah di desa Weru.

Kegiatan berupa advokasi/pendampingan dilakukan sebagai tindak lanjut dari pelatihan yang dilaksanakan KIMBis Kabupaten Lamongan, dijalankan oleh tim pelaksana (pengurus) di lokasi, yang terdiri dari Manajer KIMBis dan 3 Asisten Manajer dibantu seorang *Liaison Officer*, pendampingan ini dilaksanakan kepada para pelaku usaha dan kelompok masyarakat nelayan, diantaranya kelompok budidaya, kelompok pengolahan, dan kelompok garam. Beberapa kegiatan pendampingan antara lain:

- a. Penguatan kapasitas pelaku usaha pengolahan.
- b. Pengurusan sertifikasi PIRT bagi pelaku usaha.
- c. Peningkatan kualitas usaha pengolahan garam tradisional.
- d. Transfer teknologi pembuatan pakan buatan dan pemijahan lele.
- e. Fasilitasi permohonan kebutuhan teknologi.
- f. Pembukaan akses terhadap peluang pasar berupa pameran dan pemasaran keliling.

Beroperasinya KIMBis di desa Weru Kabupaten Lamongan sejauh ini belum maksimal hanya sebatas pelatihan untuk masyarakat. Peran dan keterlibatan *stakeholders* tidak terjadi optimal, artinya susunan *stakeholders* yang semestinya berinteraksi bersama masyarakat nelayan selain belum ditetapkan baku oleh Kabupaten Lamongan, juga pada keterlibatannya dalam kegiatan dipahami masih begitu rendah cukup dilaksanakan oleh pengurus lokasi pada kegiatan pelatihan dan pendampingan, kendati dalam beberapa kesempatan pelatihan juga didukung penyuluh dan pelaku usaha yang dianggap sesuai dalam memberikan materi kepada masyarakat sasaran. Padahal melalui definisi KIMBis diharapkan dapat menjadi bagian atau cikal bakal pengembangan kegiatan dalam bentuk kerjasama melalui *Research Extension Fisheries Community Network* (REFINE), yang pada kegiatan REFINE ini, peneliti – penyuluh – pelaku usaha

(pengolah, pembudidaya ikan, nelayan, pedagang, dan investor) melakukan kegiatan bersama untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat pesisir didukung intervensi paket teknologi dari Balitbang KP yang terpilih, renovasi paket teknologi yang diintroduksi, dan membangun jaringan kerja. Akan tetapi keterlibatan *stakeholders* yang diharapkan itu belum terjadi maksimal pada kegiatan, selain itu wujud fisik berupa inovasi rekayasa teknologi berupa (alat-alat, perangkat keras) belum diterapkan oleh Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan masih sebatas gagasan, inovasi, ide-ide untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas kehidupan masyarakat nelayan di lokasi.

Keberadaan kegiatan KIMBis didukung pemberdayaan yang dilakukan dengan pelatihan dan pendampingan, manfaat dijalankannya kelembagaan yang dirasakan masyarakat adalah orientasi kewirausahaan meningkat dan kondisi kualitas SDM berkembang cukup baik. Berdasarkan keterangan, pelaku usaha yang mengikuti pelatihan dan pendampingan bahwasannya usaha yang mereka jalankan menjadi meningkat dan lebih profesional, pendapatan dan pelanggan semakin bertambah, meningkatnya pengetahuan produksi yang baik mulai pengolahan bahan baku hingga pemasaran, serta lebih memahami kebersihan (higienis dan steril) pangan dan proses produksi.

2. Faktor-faktor yang Mendukung dan Menghambat Kegiatan Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) Sebagai Wadah Pemberdayaan Masyarakat Nelayan

KIMBis di Kabupaten Lamongan sebagai kelembagaan yang berusaha mengatasi masalah pokok kemiskinan nelayan dengan cara menumbuhkan *entrepreneurship* pada diri masyarakat nelayan tersandar pengetahuan memadai dari teknologi dan inovasi untuk usahanya tidak terlepas dari beberapa faktor penghambat dan pendukung didalam beroperasinya. Faktor internal yang mendukung adalah adanya keuntungan dari peran seorang Manajer klinik sebagai penyuluh dan ketua UPT Dinas KP Kecamatan. Sedangkan faktor penghambat internal adalah kurangnya intensitas komunikasi di antara masyarakat dengan stakeholder, dan adanya *tool* penunjang operasionalisasi KIMBis berupa petunjuk teknis kegiatan dianggap pelaksana lokasi kurang sesuai dengan lokasi atau realitas di lapangan.

Faktor eksternal yang mendukung adalah adanya dukungan dan komitmen Pemerintah Kabupaten Lamongan yang cukup besar diantaranya meliputi Dinas Kelautan dan Perikanan, keterlibatan dan komitmen penyuluh, dan dukungan pemerintah desa Weru sebagai lokasi pelaksanaan KIMBis. Sedangkan faktor eksternal yang menghambat adalah adanya resistensi dan respon dari masyarakat sasaran, dan belum adanya regulasi lanjutan ataupun kebijakan yang menguatkan KIMBis di Kabupaten Lamongan.

Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan, KIMBis dalam kegiatannya berupaya mendorong peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat nelayan di Kabupaten Lamongan, yang dikarenakan tidak mampu secara mandiri dalam mengakselerasi produksi dan memberikan nilai tambah usahanya, maka hadirnya KIMBis melalui proses pelatihan dan pendampingan menjadi bagian penting dalam mendukung tumbuhnya jiwa *entrepreneurship* tersandar teknologi dan inovasi yang memadai pada diri masyarakat nelayan dan meningkatnya kualitas sumberdaya manusia khususnya masyarakat pengolah di desa Weru.

KIMBis pada kegiatannya juga tidak terlepas dari faktor-faktor pendukung dan penghambat secara internal dan eksternal yang menjadi ancaman dan peluang di masa depan. Beberapa hal yang menjadi pendukung, yaitu 1) Keuntungan tambahan atau terdapat nilai positif dengan adanya peran manajer klinik sebagai penyuluh dan ketua UPT Dinas KP Kecamatan; dan 2) Keberadaan dukungan yang cukup besar dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan. Sedangkan hal yang menjadi penghambat, yaitu 1) Kurang dan lemahnya kualitas komunikasi antara masyarakat nelayan dengan *stakeholders* terkait; 2) Adanya resistensi dan respon dari masyarakat sasaran terhadap kegiatan KIMBis; 3) Belum adanya regulasi lanjutan ataupun kebijakan yang menguatkan KIMBis di Kabupaten Lamongan menjadikan kegiatan ini seakan hanya bersifat kegiatan milik Kementerian Kelautan dan Perikanan saja.

Beberapa hal di atas, dimengerti dan dapat dijadikan pertimbangan agar dimasa depan capaian kinerja KIMBis dapat efektif dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat nelayan pada khususnya dan masyarakat Kabupaten Lamongan pada umumnya.

Daftar Pustaka

- Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (DJPT.KKP). (2014). **Kebijakan dan Program Pembangunan Perikanan Tangkap**. Diakses melalui http://www.djpt.kkp.go.id/index.php/arsip/c/253/kebijakan-dan-program-pembangunan-perikanan-tangkap/?category_id=14 [diakses pada tanggal 03 Mei 2014].
- Friedman, Jhon. (1992). **Empowerment: The Politic of Alternative Development**. Cambridge, Blackwell.
- Gajanayake, S and Gajanayake, J. (1993). **Community Empowerment: A Participatory Training Manual On Community Project Development**. New York, PACT Publications.
- Harsono, Boedi. (2006). **Penelitian Deskriptif Kualitatif**. Jakarta, Media Pustaka.
- Indonesia Maritim Institut, 2010. Jakarta, (2010), **Perspektif Pembangunan Negara Maritim Berbasis Kelautan dan Perikanan**, Bengen. D.G. Jakarta.
- Kelautan dan Perikanan dalam Angka tahun 2013**. Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jakarta.
- Kusnadi. (2003). **Akar Kemiskinan Nelayan**. Cetakan ke-3. Jakarta, Rineka Cipta.
- Mardikanto, Totok dan Soebiato, Poerwoko. (2012). **Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik**. Bandung, Alfabeta.
- McNabb, D. E. 2002. **Research Methods in Public Administration and Nonprofit Management: Quantitative and Qualitative Approaches**. Armonk, NY: M. E. Sharpe.
- Profil Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan tahun 2012**. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kemendagri. Jakarta
- Prosiding Pelatihan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu, 2001. Bogor, (2001), **Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Strategi Pemberdayaan Mereka dalam Konteks Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Secara Terpadu**, Nikijuluw. Bogor, PKSPL-IPB
- Salim, E. (1984). **Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan Pendapatan**. Jakarta, Yayasan Idayu.
- Sumodiningrat, Gunawan. (1999). **Pemberdayaan Masyarakat dan JPS**. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Zulham, A. (2011). **Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Klinik IPTEK Mina Bisnis Dalam Mendukung Program Peningkatan Kehidupan Nelayan**. Jakarta, BBPSEKP.